

HIJRI

Jurnal Manajemen Kependidikan dan Keislaman

Vol. VII No. 1 Juli-Desember 2012

Keraguan Kualitas Pendidikan Tinggi di Daerah
Metode Double Loop Problem Solving Pada Materi Trigonometri
Perspektif Pendidikan Masa Depan
Reformasi Perundang-Undangan untuk Profesionalisme Perguruan Tinggi
Paradigma Administrasi dan Pengelolaan Sekolah
Kebijakan dan Pengembangan Sekolah

**Program Studi Kependidikan Islam
Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara
Medan**

Penanggungjawab : Dr. Wahyudin Nur Nasution, MA
Ketua Penyunting : Drs. Mesiono, M.Pd
Wakil Ketua Penyunting : Candra Wijaya, M.Pd
Sekretaris Penyunting : Fridianto, M.Pd
Wakil Sekretaris Penyunting : Sholihatul Hamidah Daulay, M.Hum

Penyunting Pelaksana:

Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd - Drs. H. Irwan Nasution, M.Sc
Drs. Amiruddin Siahaan, M.Pd - Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag
Drs. Al-Rasyidin, M.Ag - Irwan S, S.Ag, MA - H. Abd. Aziz Rusman, Lc, M.Si

Penyunting Ahli:

Prof. Dr. Z. S. Nainggolan, MA : (Universitas Negeri Jakarta)
Prof. Dr. Haidar Daulay, MA : (IAIN Sumatera Utara)
Prof. Dr. Ir. Zainuddin, M.Pd : (Universitas Negeri Medan)
Prof. Dr. Baharuddin, M.A : (STAIN Padangsidimpuan)
Prof. Dr. Samsul Nizar, MA : (UIN Syarif Qasim Pekanbaru)
Prof. Dr. Firman, MS, Kons : (Universitas Negeri Padang)
Dr. Syaiful Sagala, M.Pd : (Universitas Negeri Padang)
Dr. Popy Fuadah : (Univ. Persada Indonesia Jakarta)
Dr. Murniati, M.Pd : (Universitas Syiah Kuala Banda Aceh)
Dr. Saidurrahman, M.Ag : (IAIN Sumatera Utara)

Bendahara

Nasrul Syakur Chaniago, M.Pd : Farida Repelitawati, M.Hum

Distribusi

Kaulan Karima, S.PdI

Tata Usaha

Muhammad Ihsan, S.PdI
Asrizal, S.Kom

Diterbitkan Oleh:

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara
Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate-Medan 20731
Telp. 061-6622925-Fax. 061-6615683

DAFTAR ISI

Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Melalui Strategi Pembelajaran Kooperatif Model Jigsaw dalam Pendidikan Agama Islam Aspek Tarikh di Kelas IV SD Negeri Nomor 101766 Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan	
Dra. Gusnimar, MA	1
Keraguan Kualitas Pendidikan Tinggi di Daerah	
Indra Jaya	15
Metode Double Loop Problem Solving Pada Materi Trigonometri	
Fibri Rakhmawati, S.Si, M.Si	30
Perspektif Pendidikan Masa Depan	
Abdillah	40
Reformasi Perundang-undangan untuk Profesionalisme Perguruan Tinggi	
Reflinda	52
Paradigma Administrasi dan Pengelolaan Sekolah	
Candra Wijaya	65
Kebijakan dan Pengembangan Sekolah (School Development)	
Mesiono, M.Pd	81
Tantangan Sumber Daya Manusia Di Era Globalisasi	
Drs.Zainarti, MM	93

Keraguan Kualitas Pendidikan Tinggi di Daerah Indra Jaya

Abstract:

The issue of quality of education is a classic problem that continues to be a concern both national and local. We can not deny that there are some issues related to the revitalization of the education system in the area. Namely: first, the lack of human resource capacity of the basic concepts of system planning and management of education, the second: lack of deep awareness about the impact of decentralization and regional autonomy in the implementation of education arrangements.

Kata Kunci: Kualitas, Pendidikan Tinggi

Pendahuluan

Dengan berlakunya pelaksanaan Otonomi Pemerintahan Daerah yang diatur pada UU No.22/1999 dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada UU No. 25/1999 yang jadi tekad politik pemerintah membawa konsekuensi perubahan logis pada pelaksanaan pendidikan nasional. Dengan demikian titik pusat penyelenggaraan pendidikan akan bergeser dari pusat ke daerah. Akibatnya adalah penyelenggaraan pendidikan akan terdesentralisasi dan terotonom, sehingga pengaturan, peran, dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan akan lebih besar. Akibat yang lebih jauh dari pemberian otonom ini adalah diperlukan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah yang mampu memanfaatkan semua bentuk sumber daya lokal yang dimilikinya secara efisien dan efektif.

Kita tak dapat menyangkal bahwa ada beberapa masalah yang terkait dalam upaya revitalisasi sistem pendidikan di daerah, yaitu: *pertama:* kurangnya kemampuan SDM mengenai konsep dasar sistem perencanaan dan manajemen pendidikan, *kedua:* kurangnya kesadaran yang mendalam tentang dampak desentralisasi dan otonomi daerah dalam pengaturan pelaksanaan pendidikan.

Masalah lainnya adalah sistem dan mekanisme pengaturan SDM yang sistematis dalam menempatkan, mobilisasi dan pengembangan SDM pendidikan. Suatu fakta menunjukkan bahwa sebagian besar SDM di daerah masih mengalami mental block

akibat sentralisasi pemerintahan selama lebih dari 30 tahun lebih. Proses "Penyembuhan" mental block ini memerlukan waktu dan dapat dilaksanakan secara bertahap.

Di sisi lain, meskipun mandat otonomi pendidikan diserahkan masih hanya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, namun tak pelak lagi pendidikan tinggi pun tak mau menyia-nyiakan angin euforia kebebasan yang sedang menghempasnya, sehingga angin euforia kebebasan ini dimanfaatkan untuk mendirikan perguruan tinggi dengan alasan klasik keperdulian akan pendidikan. Gejala lain yang muncul, ketika baru saja angin kebebasan ini berhembus, sejumlah Rektor Perguruan Tinggi pun bertumbangan terkena terpa angin ini, dengan alasan "reformasi". Yang menjadi pertanyaan adalah apakah daerah sudah mampu untuk mengelola pendidikan khususnya pendidikan tinggi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pendirian perguruan tinggi di daerah perlu dicermati dengan seksama dengan memperhatikan empat permasalahan pokok yaitu: 1) bagaimana kualitas dosen di daerah, 2) bagaimana kualitas perguruan tinggi di daerah, 3) bagaimana implikasi otonomi pendidikan terhadap pendidikan tinggi di daerah, dan 4) bagaimana komitmen bangsa Indonesia dalam memajukan sektor pendidikan. Makalah ini mencoba mengupas empat permasalahan di atas, sehingga dapat dideskripsikan bagaimana kualitas dosen di daerah, bagaimana kualitas perguruan tinggi di daerah, bagaimana implikasi otonomi pendidikan terhadap pendidikan tinggi di daerah, serta bagaimana komitmen bangsa Indonesia memajukan sektor pendidikan.

Permasalahan Pokok tentang kualitas Pendidikan Tinggi

Masalah kualitas pendidikan merupakan masalah klasik yang terus menjadi perhatian baik pusat maupun daerah. Berbagai masalah kualitas yang ada di perguruan tinggi terutama di daerah adalah:

1. Kualitas Dosen di daerah

Membicarakan kualitas dosen pendidikan tinggi di tingkat daerah yang ada di Indonesia, tampaknya tidaklah fair tanpa membicarakannya dalam konteks yang lebih mengglobal. Sebab bila acuannya antar sesama daerah, barangkali tidak terlalu jauh berbeda. Berbeda halnya bila kita bandingkan dengan kualitas dosen di daerah Jawa, dan lebih jauh lagi dengan dosen dari

negara-negara ASEAN.

Dengan mengacu kepada berbagai publikasi internasional seperti UNDP, ADB, Asia Week, dan lainnya, buruknya kinerja pendidikan di Indonesia tidak dapat lagi ditutupi. Berdasarkan hasil diskusi kependidikan di Yogyakarta (Kompas., 14 Pebruari 2002), Ki Supriyoko menyebutkan bahwa ada dua faktor yang menjadi penyebab buruknya kinerja pendidikan nasional kita. Dari sederetan faktor yang teridentifikasi ternyata yang paling utama adalah faktor tenaga kependidikan, dalam hal ini guru di jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta dosen di jenjang pendidikan tinggi.

Kualitas tenaga kependidikan kita yang amat memprihatinkan itu disebabkan oleh banyak guru yang tidak menguasai subject matter atau bahan yang akan disajikan kepada pebelajar. Di sisi lain banyak dosen yang tidak memahami metodologi atau cara membelajarkan pebelajar, sebaliknya banyak guru dan dosen yang tidak menguasai kedua aspek penting dalam proses pembelajaran tersebut. Ada sinyalemen dan banyak ditemukan di persekolahan dan perguruan tinggi bahwa guru dan dosen mengajar bukan membelajarkan subyek didik.

Kualitas guru dan dosen di Indonesia pada umumnya belum memadai kiranya tak salah, terutama bila kita menggunakan bench marking tenaga kependidikan, di negara-negara maju. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Asia Week dalam Asia's Best Universities 2000 terungkap tentang rendahnya mutu dosen perguruan tinggi di Indonesia umumnya. Konkritnya, dari 77 Perguruan tinggi terbaik di kawasan Asia dan Australia, ternyata dalam hal, mutu dosen, Universitas Indonesia (UI) Jakarta hanya menempati ranking ke-62, dosen Universitas Diponegoro (Unklip) Semarang di peringkat ke-76, dan dosen Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta bahkan berada di ranking paling bontot, ke-77. Sebagai catatan, ranking ke-1 ditempati dosen-dosen University of Hong Kong (UHK), ranking ke-2 dari Toboku University di Jepang, dan ranking ke-3 dari Cheng Kung University di Taiwan (Kompas, 14 Pebruari 2002).

Pertanyaannya sekarang, bila dosen-dosen universitas yang sudah begitu maju (untuk ukuran Indonesia) masih seperti itu, lalu bagaimana derigan kualitas dosen di daerah-daerah lainnya di Indonesia? Jawabannya sudah pasti, lebih tidak bermutu lagi. Sebagai contoh kasus, dari 5 fakultas yang ada di Universitas

Palangkaraya (UNPAR), baru memiliki 7 dosen kualifikasi S3, dan 52 dosen kualifikasi S2. Bila determinan yang lain dipergunakan, apakah kualifikasi pendidikan telah menjamin mutu dosen bersangkutan? Ternyata belum tentu juga, sebab setelah pulang sekolah S2 dan S3, yang seharusnya menjadi sumber belajar yang potensial bagi rekan-rekan seprofesi, ternyata pola hidupnya malah kembali terkontaminasi dengan pola-pola lama - seperti halnya cara hidup rekannya.

Kemudian, lantas bagaimana dengan rekan-rekan mereka yang belum punya kesempatan untuk sekolah - tentu akan semakin parah. Sebagai contoh adalah masalah minat baca dosen, bila tidak ingin memperoleh gelar MA (mahasiswa abadi) ketika sekolah S2 dan S3 dapat dipastikan hampir semua mahasiswa harus rajin menulis dan meningkatkan minat dan kemampuan bacanya. Namun apa yang terjadi kemudian, setelah mahasiswa tersebut kembali ke home basic, budaya membaca ternyata sangat sulit untuk dipertahankan. Sulitnya budaya membaca ini ditumbuhkan karena berbagai faktor, di antaranya: 1) apresiasi yang rendah terhadap suatu karya tulis, karja tulis masih sekadar memenuhi kredit point, 2) lingkungan kampus yang belum kondusif untuk menumbuhkan minat baca, dianggap bodoh oleh mahasiswanya bila masih harus belajar di perpustakaan, 3) belum adanya kesadaran bahwa dengan perpustakaan pribadi di rumah, akan dapat meningkatkan kualitas hidup, survive, dan berprestasi, 4) terbatasnya daya beli dosen terhadap pernilikan buku-buku, apa-lagi media komputer dan Internet sejenisnya. Dengan segala realita kelemahan dosen yang kadang-kadang justru di luar keinginannya itu, muncul euphoria ramai-ramai mendirikan perguruan tinggi. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana implikasi pendirian perguruan tinggi dalam konteks otonomi daerah di dalam suasana penuh kelemahan seperti di sebutkan di atas ?

2. Kualitas Perguruan Tinggi di Daerah

Sekali lagi saya kemukakan bahwa membicarakan perguruan tinggi di daerah tidak terlepas dalam konteks membicarakannya secara nasional. Setelah selama lebih dari 30 tahun, hak penyelenggaraan pendidikan telah dirampas. Kini dengan alasan tugas euforia reformasi, hak itu ingin dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut kami, istilah otonomi untuk pendidikan kurang tepat apalagi dengan alasan itu lahir aturan dan

peraturan yang justru membuatnya tidak otonom lagi. Kita sebaiknya mengakui secara jujur bahwa bentuk dan cara-cara seperti inilah yang mengakibatkan keterpurukan kualitas pendidikan di Indonesia selama ini.

Untuk sekadar melengkapi data tentang bagaimana, kualitas pendidikan kita, hasil survey UNDP (1999) tentang Human Development Index, menunjukkan bahwa negara kita berada di peringkat 100 di antara 170 negara. Institusi pendidikan kita, khususnya pendidikan tinggi tidak kalah merosotnya dalam hal peringkat dengan negara-negara Asia, Australia dan New Zealand. Dengan mengambil sampel 79 universitas dan 39 institut sains, Asia Weeks melaporkan bahwa dengan menggunakan indikator-indikator reputasi akademik, seleksi mahasiswa, pasilitas sumber daya dan keuangan, research, financial resources, rasio dosen dan mahasiswa, persentase kelulusan, dan publikasi Jurnal internasional dan jaringan kerja, UI berada di peringkat 61, UGM peringkat 69, ITB peringkat 21.

Dalam bidang manajemen, pendidikan kita tidak kalah sembrautnya. Kebocoran anggaran dari tingkat pusat hingga ke daerah selalu menjadi santapan berita pada media massa. Penggunaan gelar akademik yang diduga aspal, yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan kita yang dalam banyak hal mengaku bekerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri tak dapat dicegah pemerintah.

Sejalan dengan itu Luhukay, J (2002) mengatakan bahwa keberadaan perguruan tinggi yang notabene-nya sebagai kelanjutan dan spesifikasi dari pendidikan menengah harus bisa memenuhi pasar tenaga kerja, yang saat ini belum berfungsi secara maksimal. Keberadaan perguruan tinggi di Indonesia sudah cukup banyak, namun demikian masalah mutu sumber daya manusia dan keterkaitannya dengan program yang disediakan belum sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan. Dalam penilaiannya keberadaan perguruan tinggi saat ini telah kehilangan maknanya untuk menciptakan generasi unggul dan profesional yang dibekali dengan ilmu, pengetahuan dan kreativitas. Kenyataannya perguruan tinggi saat ini hanya mampu mempersiapkan lulusannya menjadi pegawai kantor yang minim dengan pengalaman, kreativitas dan inovasi. Jika bekal keilmuan yang benar tidak diberikan, akibatnya

fenomena mengejar gelar tidak akan pernah hilang dari dunia pendidikan di Indonesia.

Hasil penelitian Litbang Media Indonesia (Media Indonesia, edisi 19 Oktober 2002) tentang sepuluh besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia dengan mengolah data sekundèr dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai acuan dan narasumber. Kriteria penilaian yang dilakukan antara, lain: a) nilai rasio perbandingan jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa. Semakin besar nilai rasio dosen-mahasiswa, nilainya semakin bagus, b) jumlah dosen yang berpendidikan S2 dan S3. Semakin banyak dosen yang berpendidikan S2 dan S3, maka perguruan tinggi tersebut memiliki nilai kualitas yang baik, c) jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing fakultas dan memperoleh akreditasi yang baik dari Dirjend.

Cara penilaian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) total nilai kualitas diperoleh dari pejumlahan poin b dan c, 2) rangking/skor diperoleh dari hasil perkalian antara total nilai kualitas dan nilai rasional perbandingan dosen-mahasiswa, 3) untuk menentukan perguruan tinggi terbaik dilakukan pejumlahan skor/rangking yang diperoleh masing-masing fakultas kemudian dibagi jumlah fakultas yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut untuk memperoleh nilai rata-rata. Hasil penilaian untuk 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia disajikan pada tabel 1 dan tabel 2 di bawah ini:

Tabel 1. Sepuluh Besar Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia.

No	PTN Terbaik 2002	Total Skor	Rata-rata Nilai (Ranking)
1	Universitas Indonesia	1,433	10, 143
2	Institut Teknologi Bandung	0, 179	3,090
3	Universitas Airlangga	0,774	0,086
4	Universitas Padjadjaran	0,564	0,056
5	Universitas Gadjah Mada	0,457	0,038
6	Universitas Diponegoro	0,289	0,029
7	Universitas Udayana	0,255	0,028
8	Universitas Sumatera Utara	0,233	3,023
9	Universitas Brawijaya	0, 170	0,021
10	-Tinst.Tek.Sepuluh Nopember	0,034	0,017

Tabel 2. Sepuluh Besar Perguruan Tinggi Terbaik Eks EKIP di Indonesia.

NO	PTN eks IKIP Terbaik 2002	Total Skor	Rata-rata Nilai (Rangking)
1	Universitas Negeri Malang	0,197	1,067
2	Universitas Negeri Padang	0,087	0,036
3	Universitas. Pend. Indonesia	0,045	0,023
4	Universitas Negeri Makasar	0,031	0,021
5	Universitas Neg. Yogyakarta	0,024	0,017
6	Universitas Negeri Jakarta	0,031	0,016
7	Universitas Negeri Surabaya	0,029	0,015
8	Universitas Negeri Medan	0,013	0,013
9	Universitas Negeri Manado	0,017	0,011.
10	Universitas Negeri Semarang	0,016	0,008

Permasalahan perguruan tinggi di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan yang serba kompleks. Ada 3 (tiga) permasalahan pokok yang mendominasi permasalahan perguruan tinggi di Indonesia, yaitu:

1. Angka lulusan sekolah menengah terus meningkat tidak seimbang dengan daya tampung perguruan tinggi.
2. Kurang sinkronnya input dan output antara jurusan yang dikembangkan dan kebutuhan pasar kerja.
3. Masih terpakunya metode pembelajaran pada paket kurikulum yang kaku, yaitu tidak memanfaatkan multichannel educationing yang berimbas pada multisourcing education.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), sudah berupaya menciptakan suatu kurikulum nasional, sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah R.I. NO 60 Tahun 1999 pasal (13) tentang kurikulum nasional bagi pendidikan tinggi sebagai berikut: 1) penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing perguruan tinggi, 2) kurikulum sebagaimana diwujudkan dalam ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional, kurikulum yang berlaku secara nasional disusun oleh menteri.

Dalarn bab penjelasan tentang PP 60/1999, mengenai kurikulum nasional ditetapkan bahwa "kurikulum yang berlaku secara nasional adalah rarnbu-rambu untuk menjamin mutu dan

kernampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh. Rambu-rambu untuk menjamin kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh merupakan patokan proporsi terhadap kategori kelompok mata kuliah. Kemudian selanjutnya untuk menentukan kualitas sebuah perguruan tinggi, pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional (BAN) menetapkan indikator-indikator yang harus dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi tersebut dapat memiliki kelayakan sebagai penyelenggara kegiatan akademik.

Sekali lagi kami kemukakan, bahwa apabila perguruan tinggi di Jawa sefavorit UI, UGM dan ITB masih jauh di bawah peringkat rata-rata menurut penilaian UNDP, lantas bagaimana kualitas perguruan tinggi di daerah apalagi perguruan tinggi barunya.

3. Implikasi Otonomi Pendidikan terhadap Pendidikan Tinggi

Adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, khususnya bidang pendidikan membuka peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang notabennya peduli terhadap pendidikan secara seporadis ramai-ramai mendirikan persekolahan dan perguruan tinggi baru di daerah. Peluang ini di satu sisi memang sangat menggembirakan, karena hal ini akan mempercepat upaya akselerasi pemerataan pendidikan bagi seluruh warga bangsa tanpa terkecuali. Alasan lain adalah masalah efisiensi, sebab putra-putri bangsa di daerah tidak perlu lagi melanjutkan pendidikan ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Manfaat lain kemudian adalah meskipun daerah minimal SDM-nya, namun sejelek-jeleknya tetap masih dapat dimanfaatkan, minimal sebagai pemicu timbulnya motivasi untuk lebih meningkatkan kemampuan (skill)-nya agar tidak tertinggal jauh, dari daerah lainnya. Dengan pendirian perguruan tinggi baru, juga diharapkan akan membantu tugas pemerintah dalam meningkatkan daya serap tenaga kerja di daerah tersebut.

Meskipun demikian, kita pun sebaiknya menyadari pula bahwa mendirikan sebuah PT tidaklah segampang atau semudah mendirikan sekolah dasar atau menengah. Kalaulah kita misalnya masih mau mengakui kriteria penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), di sana disebutkan bahwa ada 9 poin penting yang, sebaiknya mendapat perhatian dalam penyetenggaraan perguruan tinggi, yaitu: 1) mahasiswa, 2) tenaga

pengajar, 3) sarana dan prasarana, 4) kurikulum, 5) pengelolaan lembaga, 6) pengelolaan program, 7) pengelolaan pembelajaran, 8) evaluasi, dan 9) hasil kerja (Media Indonesia, 30 Juni 2001).

Bila kita mau mengakui secara jujur, ada berapa jajaran propinsi apalagi kabupaten yang mampu mendirikan perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan kriteria BAN-PT ini? Ambillah salah satu kriteria misalnya poin 2, bagaimana keadaan tenaga pengajar dilihat dari sisi: a) jumlah dosen dan pengalamannya, b) kesesuaian keahliannya, c) kualifikasi pendidikannya, d) banyak tulisan ilmiah yang sudah dibuatnya, e) kemampuan memberikan penghargaan kepada dosen, f) kegiatan penelitian dosen, g) banyaknya buku yang ditulis, h) komposisi dosen, mulai asisten hingga guru besar, i) kegiatan luar kampus dosen, j) beban kerja, dan k) pengalaman tenaga non akademis.

Memperhatikan kriteria penilaian tersebut di atas, tidaklah berlebihan apabila kemudian timbul kekhawatiran terhadap kualitas perguruan tinggi baru di daerah. Meskipun animo daerah kuat untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi dengan alasan mampu dari segi pendanaan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, namun perlu disadari bahwa itu hanya segelintir dari alat untuk mencapai tujuan besar. Jauh lebih penting adalah bagaimana tekad dan kemampuan SDM di belakang semua itu. Fakta menunjukkan bahwa pembangunan sarana fisik pendidikan sering bukan berdasarkan kaidah-kaidah pendidikan. Sering pendirian suatu perguruan tinggi didorong oleh motivasi politis, "gengsi" dan bahkan untuk tujuan komersialisasi. Sebuah propinsi (bahkan sekarang kabupaten) yang merasa masih belum memiliki perguruan tinggi memaksakan diri untuk mendirikan perguruan tinggi. Dampak berikutnya adalah lahirnya sebuah profesi baru yang demikian populer saat ini, yaitu "dosen terbang". Tanpa mengurangi idealisme sebagai pendidik, bagaimana dengan kesibukan seperti itu dapat memberikan pendidikan yang baik bagi mahasiswanya?

Sebaiknya perlu disadari bahwa mendirikan sebuah perguruan tinggi jangan dilandasi suatu pemikiran sempit irrasional-emosional yang bersifat jangka pendek, tapi justru harus berdasarkan kajian rasional empirik dan bersifat proses oriented. Perguruan tinggi bukan hanya sekadar berdiri kemudian selesai perkara, tapi bagaimana mempertahankan eksistensinya melalui perbaikan mutu yang terencana sistemik dan berkelanjutan untuk

tujuan mencerdaskan warga bangsa yang ada di daerah. Pendidikan secara metodologis tidak menghalalkan segala cara, apalagi bila hanya sekadar menganugerahkan ijazah dan gelar. Namun fenomena inilah sekarang yang terjadi, bahwa hanya dengan beberapa juta, meskipun tanpa ikut proses pendidikan, seseorang dapat saja memperoleh "Doktor". Akibatnya dapat ditebak, berhamburan "Doktor-Doktor" usia senja yang justru tidak produktif lagi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh harian Suara Pembaharuan, dari lingkungan Dikti, bahwa Presiden Megawati Sukarnoputri ketika masih wakil presiden pernah mendapat tawaran ini, namun ditolak secara tegas setelah berkonsultasi dengan Depdiknas. Ironisnya, merekapun berani menawarkannya ke para pejabat eselon I dan II Depdiknas seperti Sekjen dan Dirjen dengan hanya membayar Rp. 1 Juta akan mendapat sertifikat profesor dan doktor (HC). Menurut Dijen Dikti, guna mengantisipasi agar gelar yang diperoleh dengan cara tidak baik tersebut tidak disalahgunakan, pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada sejumlah departemen, lembaga negara, instansi swasta dan pelaku usaha untuk tidak mengakui S2 atau S3 yang diperoleh dari AHM & T, Yayasan PBI, JIMS, AIMS, IDLP, WIU, Internasional MBA dan SDP (Suara Pernerbaruan, 30 Desember 1999)

Dengan demikian, dalam upaya mengeliminir dampak negatif penyelenggaraan otonomi pendidikan di daerah, sangat diperlukan sekali manusia-manusia yang visioner dari tingkat pemerintahan pusat sampai daerah. Suatu ketika panglima angkatan perang Inggris Winston Churchill menghadapi situasi sulit terhadap invasi militer Nazi Jerman ke Eropah. Keperkasaan Nazi menyebabkan elite politik di parlemen Inggris mengusulkan agar diambil kebijakan untuk mengalihkan anggaran sektor pendidikan ke sektor militer guna membiayai perang. Sebagai individu yang dibesarkan di lingkungan militer, mestinya Churchill menyetujui usulan tersebut. Namun apa yang terjadi kernudian adalah panglima perang yang gagah ini, menolaknya mentah-mentah. Churchill mengatakan, tidak ada istilah pemotongan anggaran pendidikan meskipun Inggris akan jatuh ke tangan Nazi. Dengan suara lantang beliau berkata, "Urusan perang adalah tanggung jawab saya, bukan urusan parlemen."

Sikap keras ini yang akhirnya dipercaya menjadi perdana

menteri Inggris -dianggap sebagai sikap seorang negarawan yang visioner, punya wawasan ke depan untuk mengantarkan Inggris menuju kejayaannya. Sikap Churchill mengingatkan kita, betapa pentingnya pendidikan diletakkan ke posisi yang strategis untuk menuju kejayaan dan kemajuan suatu bangsa. Keteladanan ini jugalah yang ternyata diadopsi oleh sejumlah negarawan sehingga dapat menghantarkan negaranya lebih maju dari Indonesia, seperti Jepang, Amerika, Jerman, Malasya, Singapura, dan lainnya yang meletakkan pendidikan sebagai aspek terpenting dan menjadikannya sebagai prioritas utama di dalam membangun bangsa dan negara (Media Indonesia, 4 Mei 2002)

Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana komitmen bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan untuk tujuan membangun karakter bangsa (nation character building)?

4. Komitmen Bangsa Indonesia Memajukan Sektor Pendidikan

Sampai saat ini, komitmen untuk memajukan sektor pendidikan masih bersifat hanya sebatas konsepsional. Ditengarai bahwa masalah membuat konsep, Indonesia adalah termasuk nomor satu di dunia ini. Bagaimana kemudian pelaksanaannya, apalagi refleksinya.

Demikianlah konsep, paradigma, pendekatan, metode dan strategi pendidikan telah banyak diperkenalkan ke publik. Termasuk di antaranya manajemen berbasis sekolah, sekolah berbasis kompetensi, pendekatan sistem, pendekatan humaniora, pendekatan link & match dan masih banyak lagi yang lain. Satu hal yang paling populer dibicarakan saat ini, meskipun bagi insan pendidikan barangkali sesuatu hal yang biasa saja adalah konsep "otonomi pendidikan." Bagi sebagian orang, pekeadaan ini termasuk pekerjaan besar, karena itu sukar untuk diterapkan.

Sesungguhnya tidak terlalu sukar, yang membuatnya sukar adalah justru terletak pada sikap para pendidik yang belum dapat melepaskan diri dari cengkeraman tradisi Orde Baru sebagai operator lapangan. Praktisi pendidikan lebih suka menerima petunjuk atau pedoman pelaksanaan daripada rendalarni rasional dan hakiki teriadinya proses pendidikan/pembelajaran.

Di sisi lain, pernerintah sering salah mengartikan otonomi di bidang pendidikan ini. Hal ini tampak dari tumpukan peraturan pemerintah, yang justru mengekang praktisi pendidikan di

lapangan. Belum lagi peraturan tersebut sering membingungkan, tumpang-tindih dan tidak konsisten. Kita ambil salah satu contoh, menurut Peraturan Pemerintah R.I. No. 60 Tahun 1999 pasal 13, tentang kurikulum nasional. bagi pendidikan tinggi sebagai berikut: 1) penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing perguruan tinggi, 2) kurikulum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional, kurikulum yang berlaku secara nasional disusun oleh menteri.

Alangkah kontradiksinya kedua peraturan di atas. Di satu pihak penyusunan kurikulum berdasarkan Masing-masing perguruan tinggi, namun di pihak lain harus berpeda pada kurikulum yang disusun menteri. Kenapa kita tidak berani mengatakan laksanakanlah dulu proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang kamu buat kemudian kita evaluasi kemajuan relevansi, dan prospektifnya. Sering kali terjadi kontradiksi antara aturan dan tujuan, antara aturan dan strategik dan praktik karena aturan dan kebijaksanaannya sering didasarkan pada kepentingan sesaat. Sejauh pemerintah dalam kebijakannya masih mencampur - adukkan semua indepeadensi akademik dengan pendekatan politik, maka sejauh itu pula untuk tidak boleh berharap banyak bahwa bangsa ini akan melahirkan anak-anak bangsa visioner dan kreatif.

Untuk melahirkan anak-anak bangsa yang kreatif dan visioner, dalam tataran konsep Indonesia punya segudang konsep, termasuk yang sekarang lagi hangat dibicarakan adalah proses pendidikan dengan pendekatan "kurikulum berbasis kompetensi" KBK adalah suatu konsep kunkulurn yang menekankan pada pengmbagan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh pebelajar, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu (Mulyasa, 20G2).

Pengalaman membuktikan, bagaimana briliannya suatu konsep tanpa aksi nyata, tetap saja hanya sebatas konsep. KBK atau apapun namanya, tanpa kita menjadikan proses pembelajaran menyenangkan, berorientasi kepada subyek pebelajar, kelas yang lebih kecil, dan didukung oleh sarana dan prasarana yang menyenangkan untuk tedadinya peristiwa belajar, janganlah terlalu banyak berharap bahwa bengsa ini akan segera keluar dari krisis

multi-dimensional.

Sebagai insan praktisi pendidikan, kita sernua mengetahui bahwa krisis multidimensi yang terjadi saat ini bermula dari apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan. Pola pikir anak-anak bangsa yang semula terstruktur dengan rapi menjadi porakporanda dan tak menentu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk pola kehidupan kita, namun yang muncul justru kekacauan yang semakin terstruktur dan semakin besar kekacauan yang ditimbulkannya. Semakin anak didisiplinkan untuk dapat melakukan sesuatu yang dapat diharapkan, semakin pemberontakan yang muncul. Setiap anak ketika selalu dihantui perasaan tegang dan takut, dan setiap lonceng pulang mereka pun diluapi perasaan senang menunjukkan bahwa siswa merasa sekolah bukanlah tempat yang untuk belajar, tetapi menjadi tempat penyiksaan dan sangat membosankan. Sekolah bukanlah tempat untuk mendapatkan kenikmatan dalam belajar. Dengan kondisi seperti ini, tidaklah mengherankan bila siswa yang tampaknya manis dan patuh ketika berada di sekolah, namun begitu liar ketika berada di luar sekolah.

Padahal, Dyden dan Vos (1999) mengungkapkan bahwa belajar adalah sesuatu kesungguh menyenangkan. Menyenangkan berarti seluruh komponen fisik dan non fisik si pebelajar, bebas dari tekanan. Menyenagkan berarti juga si pebelajar berada dalam keadaan yang sangat relaks, tidak ada sama sekali ketegangan yang mengancam dirinya baik disudut-sudut terkecil dalam diri non fisik maupun fisik dari si pebelajar

Lebih lanjut dikatakannya bahwa keadaan belajar yang menyenangkan akan melapangkan jalan seseorang mendayagunakan seluruh poyensi yang dimilikinya secara optimal. Dalam bahasa lain, keadaan belajar yang menyenangkan akan mendorong seseorang untuk bersungguh-sungguh, terlibat secara total, dan mengasyikkan dalam melakukan sesuatu - termasuk dalam belajar.

Jadi, bila pembelajar/pendidik menganggap bahwa pebelajar/siswa adalah sebagai subyek pelaku (student oriented), maka benar bahwa pendidikan adalah suatu proses memanusiakan manusia (to be human). Jadi yang terpenting adalah bagaimana mengimbangkan kemampuan mental pebelajar sehingga ia dapat belajar dan berpikir, sebab dengan berpikir itulah yang membedakan manusia dari hewan. Jadi, belajar itu sendirilah yang

menjadi tujuan pendidikan.

Penutup

Perlu komitmen yang tinggi baik pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas. Regulasi yang dibuat tertuang didalam undang-undang dan peraturan pemerintah harus dijalankan secara konsisten. Pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta harus menghindarkan diri dari praktek kapitalisme pendidikan, dukungan dan komitmen pendidik untuk menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas terutama swasta sangat mutlak diharapkan sehingga kualitas pendidikan tinggi di daerah bukan hanya sebatas harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Soehendro. (1996), *Jakarta Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005*. Depdikbud Dirjend Dikti.
- Dedi Supriadi. (1997). *Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di Indonesia*. PT Rosda Jayaputra.
- Draf Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Komiten Reformasi Pendidikan, 2002)
- Dryden, Gordon & Vos ' Jeannette. 1999. *The Learning Revolution: To Change the Way the World Learns* - Jilid 1 &2. Saduran. Bandung: Kaifa.
- Haryana. 1996, 12 November. *Pengarahan pada Pertemuan Pimpinan PTS se Kopertis Wilayah V*. Yogyakarta: Kopertis Wilayah V.
- Kompas (19 Januari 2002). *UGM Deklarasikan Tahun Sistem Jaminan Mutu*. Jakarta.
- Kompas. 2002, 14 Pebruari. *Kiialitas Guru dan Dosen di Indonesia*.
- Kompas. Sabtu 27 Oktober 2001. *Legalilitas Program Kelas Jauh*. Jakarta.
- Lewis, Ralph G (1994). *Total Quality In Higher Education* : Florida, St. Lucie Press.
- Media Indonesia 3 November 2001. *Kelas Jauh Akalan-akalan Jual Beli Ijazah*. Jakarta
- Media Indonesia. 2002, 19 Oktober. *Sepuluh Besar Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia*
- Media Indonesia. 2002, 4 Mei. *Komitmen Kunci Sukses Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang *Pendidikan Tinggi*.
- Peterson, Marvin W., et al. (1991). *Organization and Governance in Higher Education*. Massachusetts- Ginn Press.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidi, Indrajati. (2000). *Otonomi Pendidikan*. Kompas, 19 Oktober 2000.
- Tucker, Allan (1992). *Chairing The Academic Department.- Leadership among Peers* (Third Edition). New York.- Macmillan Publishing Company.